



Bobby Rahman, Teuku Muzaffarsyah dan Fisca Elisa

EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENERTIBKAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKEUMAWA

Teuku Muzaffarsyah, M. Akmal dan Fitratulaini Sikumbang

STRATEGI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMOBILISASI DUKUNGAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA LHOKEUMAWA

Mulyadi, Taufik Abdullah dan Nanda Saputri

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA 2017 DI KOTA LHOKEUMAWA

Rizawati dan Muhammad Bin Abubakar

PERILAKU POLITIK SANTRI DAYAH DALAM MERESPON KETERLIBATAN ULAMA BERPOLITIK PRAKTIS

Teuku Muzaffarsyah dan Zulhildi

PERILAKU MASYARAKAT TIONGHOA DALAM POLITIK PRAKTIS (STUDI PILKADA 2017 DI KOTA LHOKEUMAWA)

Taufik Abdullah, Mulyadi dan Nurul Fauziah Risna

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENCALONAN PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PILKADES PERIODE 2017-2023





JPP Jurnal Politik dan Pemerintahan

- Penasehat : Dr. Herman Fithra, ST., MT., IPM (Rektor Universitas Malikussaleh)
Penanggung Jawab : M. Akmal, S.Sos., MA (Dekan FISIP Universitas Malikussaleh)
Ketua Dewan Redaksi : Bobby Rahman, S.Sos., M.Si (Ketua Prodi Ilmu Politik)
Wakil Ketua Redaksi : Teuku Muzaffarsyah, S.IP., M.A.P.
Sekretaris : Zulhilmi, S.IP., M.H.I.
Desain Grafis : M. Ridwan, S.IP., M.Soc.Sc
- Anggota Dewan Redaksi : Dahlan A. Rahman, S.Ag., MA.
Naidi Faisal, S.IP., M.Si.
Zulham, BA., MA.
Alfian, S.Hi., MA.
Mulyadi, S.Ag., MA.
M. Rizwan Haji Ali, S.Ag., MA.
Zulhilmi, S.IP., M.Si.
- Editor Ahli : Prof. Dr. Sity Daud (Universitas Kebangsaan Malaysia)
Prof. Dr. Taufik Abdullah, MA. (LIPI)
Prof. Dr. Djoko Suryo, MA (Universitas Gadjah Mada)
Warjio, Ph.D. (Universitas Sumatera Utara)
Dr. Iskandar Zulkarnain, SE., M.Si.
Dr. Muntasir, S.Ag., MA.
Dr. Rasyidin, S.Sos., MA.
Dr. Muhammad Bin Abubakar, B.HSc., MA.
- Staf Tata Usaha : Hamdani, S.Sos
Rukaiyah, S. Sos

EDITORIAL OFFICE

Program Studi Ilmu Politik - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Malikussaleh
Kampus Bukit Indah - Lhokseumawe
Telp/Fax : 0645 – 58450367 Email : ilmu.politik@unimal.ac.id
<http://www.unimal.ac.id> | <http://www.fisip-unimal.com>

KATA PENGANTAR DEWAN REDAKSI

Puji syukur kehadirat Allah SWT, kami ucapkan atas tersusunnya Jurnal Politik dan Pemerintahan (JPP) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh edisi perdana.

Penyusunan Beberapa artikel ini dilandasi dengan semangat membumikan sekaligus membangun pengetahuan dan pemikiran ilmiah kepada masyarakat Indonesia terkait dengan fenomena Politik dan Pemerintahan baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

Dengan tersusunnya JPP edisi perdana ini, semoga dapat memberikan manfaat dan memperluas wawasan keilmuan dalam aspek politik dan pemerintahan. Demi peningkatan kualitas Jurnal Politik dan Pemerintahan (JPP) Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan sebagai upaya perbaikan dan pembaharuan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan pada seluruh dewan redaksi berkenan membantu dan kerjasama dalam menerbitkan naskah JPP ini. Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada segenap jajaran JPP atas dedikasi dan kerjasamanya dalam upaya mewujudkan penerbitan JPP edisi perdana ini.

Salam,

Ketua Dewan Redaksi

Daftar Isi

Kata Pengantar Dewan Redaksi

EFEKTIFITAS FUNGSI PENGAWASAN PANITIA PENGAWAS PEMILU DALAM MENERTIBKAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU 2019 DI KECAMATAN BANDA SAKTI KOTA LHOKSEUMAWE

Bobby Rahman, Teuku Muzaffarsyah dan Fisca Elisa 1

STRATEGI CALON LEGISLATIF PEREMPUAN PARTAI DEMOKRAT DALAM MEMOBILISASI DUKUNGAN PADA PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019 DI KOTA LHOKSEUMAWE

Teuku Muzaffarsyah, M. Akmal dan Fitratulaini Sikumbang 19

NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA 2017 DI KOTA LHOKSEUMAWE

Mulyadi, Taufik Abdullah, dan Nanda Saputri 33

PERILAKU POLITIK SANTRI DAYAH DALAM MERESPON KETERLIBATAN ULAMA BERPOLITIK PRAKTIS (Studi Kasus Dayah Nurul Muhtadie Al-Aziziyah Meuria Paloh Kota Lhokseumawe)

Rizawati dan Muhammad Bin Abubakar 49

PERILAKU MASYARAKAT TIONGHOA DALAM POLITIK PRAKTIS (STUDI PILKADA 2017 DI KOTA LHOKSEUMAWE)

Teuku Muzaffarsyah dan Zulhilmi 67

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENCALONAN PEREMPUAN DALAM KONTESTASI PILKADES PERIODE 2017-2023 (Studi Kasus Gampong Simpang Empat Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe)

Taufik Abdullah, Mulyadi dan Nurul Fauziah Risna 81

PERILAKU MASYARAKAT TIONGHOA DALAM POLITIK PRAKTIS (STUDI PILKADA 2017 DI KOTA LHOEKSEUMAWE)

Teuku Muzaffarsyah dan Zulhilmi

Email: tmuzaffarsyah@unimal.ac.id/zulhilmi@unimal.ac.id

Universitas Malikussaleh, Aceh Utara

ABSTRAK

Fenomena politik muncul karena adanya proses perilaku Politik dari masyarakat namun hal ini merupakan sebuah keharusan dalam prosesnya. Dinamika politik Praktis menimbulkan fenomena perilaku masyarakat terhadap terbentuknya pemerintah. Proses politik ini juga memunculkan sebuah budaya politik yang sangat tinggi serta dapat disebut "*era millineal*". Urgensitas dari perilaku masyarakat memberi sebuah hal yang berbeda dan menarik jika membahas tentang etnis Tionghoa. Masyarakat Tionghoa merupakan minoritas yang ada di Indonesia. Secara umum masyarakat Tionghoa merupakan masyarakat yang konsisten di bidang ekonomi dan perdagangan. Politik praktis yang muncul memberikan sebuah respon yang positif dari masyarakat Tionghoa. Khususnya di wilayah Provinsi Aceh memberikan sebuah hal yang penting dalam sebuah perilaku politik praktis. Penelitian ini mencoba memfokus tentang proses politik serta partisipasi etnis Tionghoa yang Muncul di Kota Lhokseumawe. Keuntungan yang didapat oleh etnis Tionghoa sangat signifikan dalam proses politik yang muncul dalam politik praktis. Perilaku politik juga memberi peluang akan negosiasi bagi Etnis Tionghoa sebagai masyarakat minoritas. Pada saat Pemilihan kepala daerah di kota Lhokseumawe sangat relevan dalam memunculkan perilaku politik Etnis Tionghoa. Pemilihan pemimpin tentu saja akan berkualitas jika dibarengi dengan para pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihan. Pilkada memberikan gambaran tentang pembentukan sistem pemerintahan yang baik dan berkaitan dengan masyarakat Tionghoa. Aspek pengembangan partisipasi ditentukan dari tingkat keinginan dari masyarakat yang terlibat aktif dalam proses politik. Aspek yang paling penting dalam perilaku Politik masyarakat Tionghoa adalah memberi ruang partisipasi dalam proses demokrasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tentang Perilaku masyarakat Tionghoa dalam politik praktis di Aceh khususnya bagi Kota Lhokseumawe. Tingkat partisipasi politik masyarakat Tionghoa member gambaran aktifnya kaum minoritas dalam proses demokrasi. Pelaksanaan penelitian ini akan menggunakan Metode kualitatif dikarenakan data yang dibutuhkan bersifat kualitatif dikarenakan mencoba menemukan skala tingkat partisipasi masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe sehingga penelitian ini melihat pada kesiapan dan paradigma. Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai berikut, observasi, wawancara dan dokumentasi. Hal ini diperlukan untuk menemukan data di lapangan secara akurat

Kata Kunci : Perilaku, Politik, Masyarakat, Tionghoa, Lhokseumawe

A. Pendahuluan

Fenomena politik yang berkembang memberikan sebuah gambaran semakin memunculkan tingkat keaktifan masyarakatnya. Hal yang paling menarik ketika partisipasi politik masyarakat meningkat tidak saja dalam dimensi demokrasi namun juga dalam proses menentukan kebijakan oleh pemimpinnya. Keberadaan masyarakat Tionghoa menambah dinamika politik yang terjadi di Indonesia. Pasca reformasi, membawa dampak positif bagi kalangan etnis Tionghoa dimana salah satunya yaitu dengan terbukanya ruang politik untuk keterlibatan dan partisipasi politik Etnis Tionghoa secara aktif. Seperti diketahui bahwa pada masa Orde Baru sangat membatasi ruang gerak Etnis Tionghoa dalam politik. Mereka hanya bisa bergerak secara aktif dalam bidang ekonomi.

Masyarakat Turunan WNI sering diabaikan sehingga warga Tionghoa harus independen dan tidak memihak pada organ politik manapun dan berdampak pada perilaku politik yang sangat seimbang dan fokus. Hal ini merupakan sebuah aspek terpenting bagi masyarakat Tionghoa pada partisipasi politik sehingga memberikan sebuah gambaran secara umum yang sebenarnya ada beberapa individu masyarakat Tionghoa yang berpartisipasi aktif dalam politik namun tidak terlalu mendapatkan dukungan moral dari masyarakat Tionghoa sendiri. Proses tersebut juga tidak terlepas dari sejarah masa lalu. Banyak dari masyarakat Tionghoa meninggalkan negaranya karena keadaan politik yang

tidak mendukung sehingga mereka banyak menuju ke beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia.

Aceh merupakan sebuah daerah yang memiliki masyarakat Tionghoa yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota. Partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa muncul berdasarkan pilihan dari pimpinan organisasi kelompok. Hal ini menggambarkan beberapa proses seperti siklus partisipasi politik berikut. Pertama, isu politik yang berkembang mampu mempengaruhi partisipasi politik masyarakat etnis Tionghoa secara umum. Kedua Sarana atau media politik yang digunakan tergantung adanya instruksi dari ketua paguyuban dalam partisipasi. Ketiga proses partisipasi hanya sebatas seremonial saja dalam dimensi politik. Keempat pengalaman masa lalu membuat masyarakat Tionghoa mempunyai sikap politik tersendiri dalam menentukan pilihan terhadap calon pemimpin yang dipilih dalam Pilkada maupun pemilu.

Perlu dipahami bahwa masyarakat Tionghoa merupakan patron yang sangat penting dalam dinamika politik lokal maupun nasional. Walaupun minoritas masyarakat Tionghoa dalam proses pemilihan mampu memenangkan calon-calon kepala daerah yang ada pada saat pilkada. Di Aceh masyarakat etnis Tionghoa merupakan minoritas yang umumnya secara ekonomi mapan. Sehingga partisipasi politik tidak terlalu signifikan hanya aktif pada proses pemilihan baik Pilkada maupun Pemilu. Hal ini merujuk pada sejarah masyarakat Tionghoa yang berpartisipasi politik pada masa

colonial yang diberi kekuasaan di bidang ekonomi. Sehingga di Aceh banyak para pengusaha dan home industri berasal dari masyarakat minoritas Tionghoa. Peluang bisnis juga mampu diraih oleh pengusaha-pengusaha dari masyarakat minoritas Tionghoa.

Dinamika politik yang berkembang pasca konflik Aceh memberikan gambaran baru bagi masyarakat minoritas Tionghoa dalam partisipasinya. Beberapa partisipasi politik yang dijalankan lebih kepada penentuan kepemimpinan politik melalui mekanisme pemilihan. Namun selain dimensi tersebut tidak ada yang lain dalam dimensi politik sehingga hal tersebut belum begitu nampak terhadap perilaku politik etnis Tionghoa di Aceh. Dinamika di Aceh masih bersifat umum namun khususnya di Kota Lhokseumawe partisipasi politik masyarakat Tionghoa sangat penting dalam menentukan sikap politiknya terhadap pasangan calon dalam pemilihan walikota Lhokseumawe. Namun yang menarik pasangan pertahana selalu mendapat dukungan penuh dari masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe.

Perilaku politik masyarakat Tionghoa di Indonesia sangat dinamis karena dipengaruhi oleh isu-isu politik local yang berkembang dalam dimensi politik. Ada personal atau individu dari masyarakat Tionghoa terlibat katif dalam politik dan menjadi kader partai politik. Namun tidak terlalu signifikan. Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia sehingga masih belum begitu jelas perilaku masyarakat Tionghoa

secara umum di Kota Lhokseumawe. Hal ini memberi gambaran bahwa perilaku etnis Tionghoa di Lhokseumawe masih bersifat persuasi sehingga personalisasi belum begitu kuat. Perilaku politik yang non personalisasi ini menggambarkan seperti ada permasalahan dalam perilaku masyarakat minoritas Tionghoa dalam partisipasi politik di Kota Lhokseumawe.

Fokus ini yang merupakan sebuah perilaku politik masyarakat Tionghoa dengan organ politik di Indonesia. Fokus tersebut ada dalam kaitan dengan dimensi ekonomi dan hal tersebut merupakan dimensi keuntungan atau kalkulasi politik. Selain di skala nasional perilaku Politik Masyarakat Tionghoa juga berbeda dengan Aceh. Provinsi Aceh juga sudah berlaku Qanun Syariat Islam sehingga mengubah pola perilaku sosial. Selain Aceh secara fokus ekonomi menjadi sebuah keharusan bagi etnis Tionghoa di Aceh. Masyarakat Tionghoa banya yang tinggal di Aceh dengan intensitas dalam bidang perdagangan atau ekonomi. Selanjutnya dalam pemilihan kepala daerah juga Masyarakat Tionghoa berhak untuk memilih. Hal ini didasarkan pada UndangUndang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnik telah memberi peluang bagi WNI turunan untuk aktif dalam berbagai dimensi di Indonesia.

Partisipasi Masyarakat Tionghoa di pilkada Kota Lhokseumawe hanya desakan kelamnya sejarah konflik di Aceh sehingga mereka trauma akan

sejarah masa konflik. Serta ke ikutsertaan mereka dalam kancah politik dipengaruhi oleh intimidasi, atau bahkan karena kesadaran mereka sebagai warga negara yang baik untuk melakukan setiap tanggung jawab dan tuntutan dari undang-undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 2006 (pasal 1), dan juga dalam UUD 1945 (amandemen) Bab X Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27, Ayat (3) juga dikatakan bahwa "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". walau saat ini mereka hanya sebatas pemilih. Hanya sebagian kecil dari masyarakat minoritas Tionghoa yang berkecimpung di dunia politik.

Landasa yuridis jelas memberikan sebuah gambaran bahwa perilaku politik etnis diatur sehingga harus aktif dan partisipatif. beberapa pembahasan yang harus dilakukan oleh masyarakat Tionghoa jika mau melakukan partisipasi politiknya. Namun banyak persoalan yang muncul sehingga masyarakat Tionghoa sangat persuasif dalam partisipasi politik hanya sebatas pemilihan pemimpin di Kota Lhokseumawe. Hal ini memberikan gambaran awal bahwa perilaku etnis Tionghoa belum begitu kuat dalam dimensi politik. Partisipasi politik masyarakat Tionghoa sangat rendah dalam proses penyusunan kebijakan dan tidak terlalu mengkritik pemerintah.

perilaku politik Masyarakat Tionghoa dalam Politik di Kota Lhokseumawe berdasarkan dinamika yang berkembang masih sangat rendah secara umum. Namun intensitas

perilaku politik dalam pemilihan kepemimpinan antusias sehingga perlu adanya pemetaan berbagai potensi pengembangan perilaku politik masyarakat Tionghoa di Lhokseumawe dalam melihat kelebihan maupun kelemahan dan menjadi rekomendasi politik pada dimensi perilaku politik sebagai dasar penyempurnaan persoalan. Selanjutnya dampak perilaku masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe belum begitu efektif karena masih adanya sikap pesimis dan faktor sejarah panjang yang dilalui selama ini.

Dampak perilaku masyarakat Tionghoa dalam menyikapi dinamika politik yang muncul di Kota Lhokseumawe belum begitu signifikan. Sebenarnya diperlukan peningkatan partisipasi aktif masyarakat etnis Tionghoa dalam politik sehingga memberikan sebuah kekuatan yang kuat dan solid dalam upaya memperjuangkan aspirasi masyarakat etnis Tionghoa dalam Politik secara aktif. Sehingga perilaku etnis Tionghoa belum terarah kepada pencapaian aspirasinya.

B. Tinjauan Pustaka

1. Teori Perilaku (*Behavioral Theory*)

Teori Behavioral menitikberatkan perhatian pada tindakan politik individu yang menonjolkan sejauh mana peranan pengetahuan politik sehingga terpengaruh pada perilaku politiknya (Nasiwan, 2010:33). Kaum behavioralis berusaha menjelaskan tingkah laku manusia dalam kegiatan politik. Teori Sistem Umum dipercaya juga sebagai

akar dari kemunculan Teori Behavioralis, Teori ini mengatakan bahwa motivasi utama tindakan atau perilaku politik manusia adalah hasrat untuk melipatgandakan kemanfaatan akan sesuatu yang bernilai (Nasiwan, 2010: 33- 34).

Skinner (Notoatmodjo, 2012 : 34). seorang ahli psikologi merumuskan bahwa Behavior merupakan respons atau reaksi seseorang terhadap stimulus (rangsangan dari luar), oleh karena perilaku itu terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespons. Respons dapat dibedakan menjadi dua. Pertama *Respondent respons* atau reflexive, yaitu respons yang timbulkan oleh rangsangan-rangsangan (stimulus) tertentu. Misalnya cahaya terang menyebabkan mata tertutup. Respons ini mencakup perilaku emosional, misalnya mendengar berita musibah menjadi sedih. Kedua *Operant respons* atau *instrumental respons*, yaitu respons yang timbul dan berkembang kemudian diikuti oleh stimulus atau perangsang tertentu. Misalnya apabila petugas kesehatan melaksanakan tugasnya dengan baik kemudian memperoleh penghargaan dari atasannya, maka petugas kesehatan tersebut akan lebih baik dalam melaksanakan tugasnya.

Notoatmodjo (2007 : 42) menyatakan Faktor-faktor yang mempengaruhi Behavior Menurut Lawrence Green bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh dua faktor pokok, yaitu faktor perilaku (*behaviour causes*) dan faktor diluar perilaku (*non*

behaviour causes). Selanjutnya perilaku itu sendiri ditentukan atau terbentuk dari 3 faktor. Pertama, faktor predisposisi (*predisposing factors*), yang mencakup pengetahuan, sikap dan sebagainya. Kedua, faktor pemungkin (*enabling factor*), yang mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersedianya APD, pelatihan dan sebagainya. Ketiga, faktor penguat (*reinforcement factor*), faktor-faktor ini meliputi undang-undang, peraturan-peraturan, pengawasan dan sebagainya.

2. Partisipasi Politik

Menurut Fatahullah Jurdi (2014:217) partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga negara dalam setiap proses politik. Keikutsertaan warga negara dalam proses politik tidak hanya berarti warga negara mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan saja. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara dalam segala macam tahapan kebijakan, mulai dari pembuatan kebijakan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk peluang warga negara untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan. Keith Fauls (2010 :133) memberikan definisi partisipasi politik sebagai keterlibatan secara aktif (*the active engagement*) dari individu atau kelompok ke dalam proses pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup keterlibatan dalam proses

pengambilan keputusan maupun berlaku oposisi terhadap pemerintah.

Menurut Miriam Budiarmo, (2007:150) menyatakan bahwa partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya. Huntington dan Nelson (2011: 3) partisipasi politik sebagai Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud sebagai pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau secara damai atau kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut A. Rahman H.I (2007:288) tipologi partisipasi politik sebagai bentuk kegiatan dibedakan menjadi :

1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang berorientasi pada proses input dan output. Artinya setiap warga negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan publik mengajukan alternatif publik yang berlainan dengan pemerintah, mengajukan

kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, memilih pemimpin pemerintah dan lain-lain.

2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada output, dalam arti hanya mentaati peraturan pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap peraturan pemerintah.
3. Golongan putih (Golput) atau kelompok apatis karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari yang telah dicitacitakan.

C. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Moleong J lexy (2012: 4). Jenis penelitian kualitatif menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, serta kualitatif eksploratif. Pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis tentang pemahaman politik pada pemilih pemula dalam pemilu maupun pilkada, serta ditinjau dari faktor penghambat dan pendukung seperti sumberdaya yang tersedia, komunikasi antar *stakeholder*, sikap implementor terhadap program serta kondisi lingkungan menyangkut dengan kondisi sosial, ekonomi dan kondisi politik. berdasarkan fakta-fakta dengan mengemukakan fenomena-fenomena sosial di lapangan secara lengkap sesuai aspek yang diteliti.

Analisis dilakukan dengan menghubungkan teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, suatu gejala sehingga memperoleh hasil kesimpulan dan rekomendasi tentang bagaimana Perilaku Masyarakat Tionghoa dalam politik Praktis di Kota Lhokseumawe. Subjek penelitian adalah Masyarakat Tionghoa. Alasan penggunaan metode diskriptif kualitatif dikarenakan data yang dibutuhkan bersifat kualitatif, desain penelitian ini bersifat studi evaluasi implementasi, dikarenakan Perilaku Masyarakat Tionghoa dalam Politik Praktis di Kota Lhokseumawe belum begitu muncul dipermukaan, sehingga penelitian ini melihat pandangan masyarakat Tionghoa dalam menentukan arah politiknya dalam mengikuti perkembangan dinamika politik di Indonesia.

Pengumpulan dan Pengolahan Data dalam penelitian ini menggunakan observasi atau pengamatan. Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan dilakukan. Penggunaan dokumen dalam penelitian ini adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum kepala Daerah serta Undang-undang No 11 Tahun 2006 Tentang pemerintah Aceh yang menjelaskan tentang tata cara Pilkada serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Dokumen dimaksud mencakup surat-surat, data/data/informasi, catatan, foto-foto

kegiatan, rekaman tape recorder dan lainnya yang relevan serta berkas laporan-laporan yang telah disusun berbagai pihak tentang obyek yang diteliti.

D. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Perilaku Masyarakat Tionghoa dalam menyikapi proses Politik Praktis di Kota Lhokseumawe

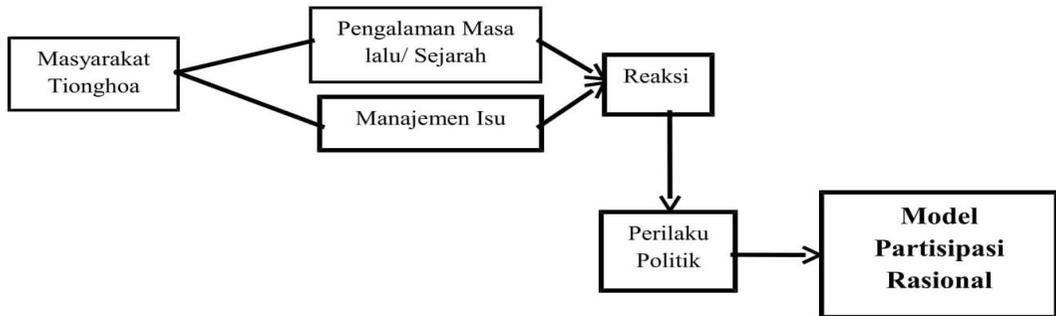
Perilaku politik masyarakat Tionghoa sangat dinamis karena berkaitan dengan model partisipasi Rasional. Model partisipasi rasional ini yang menjadi gambaran dalam hasil penelitian ini. Hal ini berkaitan dengan *Behavioral Theory* dan partisipasi politik. Perilaku etnis Tionghoa di Kota Lhokseumawe tidak terlalu signifikan ada beberapa indikator yang terjadi sehingga mengakibatkan terjadinya partisipasi rasional. Model ini ditemukan dari penelitian lapangan sehingga model ini lahir dari kerangka teori yang digunakan. Partisipasi rasional tidak terlepas dari isu-isu politik yang berkembang di Kota Lhokseumawe sehingga masyarakat Tionghoa memiliki sikap politik tertentu. Hal tersebut juga tidak terlepas karena lemahnya personalisasi aktif dari masyarakat Tionghoa dalam perilaku politik yang ingin bebas dan aktif.

Proses politik yang berkembang juga memberikan gambaran bahwa masyarakat Tionghoa kurang responsif terhadap isu-isu politik selain dinamika Pra pemilihan maupun pasca pemilihan baik Pilkada maupun Pemilu di Kota Lhokseumawe. Namun intesitas

perilaku politik masyarakat Tionghoa lebih kepada partisipasi rasional seperti

gambaran pada Gambar berikut ini:

Gambar 1 Arah Perilaku Etnis Tionghoa di Kota Lhokseumawe



Arah perilaku Politik Etnis Tionghoa sangat jelas digambarkan di atas bahwa proses dinamika politik di Kota Lhokseumawe dalam politik sangat besar pengaruhnya. proses perilaku etnis Tionghoa di kota Lhokseumawe sering termarjinalkan dalam partisipasi politik. Namun gejala yang muncul perilaku etnis tionghoa lebih bersifat partisipasi umum saja dalam proses demokrasi. Di Aceh secara umum masyarakat Tionghoa tidak terlalu aktif dalam politik praktis dan lebih mendalami dimensi ekonomi dan bisnis. Tentu hal ini memberikan sebuah perilaku masyarakat yang pasif dalam politik sehingga masyarakat Tionghoa sangat minim menjadi politisi. Sementara di Kota Lhokseumawe ada hal yang berbeda dengan wilayah lainnya di Provinsi Aceh. Kota Lhokseumawe memang merupakan sebuah wilayah yang sangat maju dan berkembang namun minoritas masih belum mendapat tempat yang signifikan dalam gelanggang politik. Masyarakat Tionghoa juga tidak terlalu

tertarik dengan politik karena ada berbagai dinamika yang berlaku.

Perilaku politik masyarakat Tionghoa sangat pasif dikarenakan adanya problematika masa lalu pada masa 1965 sehingga menjadi sangat sensitif jika berbicara tentang politik karena faktor trauma tersebut hal ini seperti yang digambarkan pada data yang didapat bahwa persoalan politik merupakan hal yang sangat sensitif bagi masyarakat Tionghoa secara Umum Karen proses politik berjalan sesuai dengan alurnya jadi kalau ada keterlibatan masyarakat Tionghoa dalam politik sangat minim dan hal ini memberikan sebuah gambaran bahwa ikut berpartisipasi saja dalam dinamika politik yang ada dalam aspek pemilihan baik PIlkada, Pemilu maupun pilpres. Tentu partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa hanya sebatas dari dimensi rasional dengan melihat fenomena politik yang berkembang di Kota Lhokseumawe. Hal ini memberikan sebuah partisipasi yang aktif namun dalam aspek pemilihan dan

bisa dikatakan sebagai *traumatic* (ketakutan) masa lalu sehingga dibutuhkan *Treatment* (penyembuhan) dari trauma masa lalu.

Penerapan *Treatment of Traumatic Syndrome* merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat Tionghoa dalam Politik di Kota Lhokseumawe. Perilaku politik masyarakat Tionghoa memang sangat beragam sehingga namun focus pada satu arah saja yaitu proses legitimasi politik melalui sarana pemilihan. Partisipasi politik dari masyarakat Tionghoa memang sangat diperlukan dalam memberikan sebuah dialektika tentang perkembangan Teori Perilaku. Etnis Tionghoa di Kota Lhokseumawe juga menyadari bahwa kekuatan dukungan politik mereka mampu mempengaruhi arah kepemimpinan Kota Lhokseumawe pada periode selanjutnya. Sarana pendekatan perilaku politik etnis Tionghoa ini khususnya di Kota Lhokseumawe lebih kepada penekanan pada Paguyuban atau Organisasi Tionghoa.

Maka Model Partisipasi Rasional memberikan sebuah gambaran bahwa perilaku Etnis Tionghoa dalam Politik di kota Lhokseumawe aktif namun semi pasif. Munculnya aktif semi pasif karena adanya pengaruh dari paguyuban dan penekanan yang lebih dari kelompok kepentingan yang ada di Kota Lhokseumawe. Proses politik yang muncul menjadi sebuah sumber masalah bila masyarakat Tionghoa terlibat terlalu jauh sehingga perlu sebuah trobosan. Trobosan ini juga tidak terlepas dari upaya pemulihan

rasa takut untuk berpolitik (Traumatis). Selain itu ada beberapa aspek yang lain sehingga terjadi sebuah pemikiran yang paradoks dari sebagian masyarakat Tionghoa. Hal ini dikarenakan permasalahan atau fenomena masa lalu yang membuat masyarakat Tionghoa tidak berani untuk beraktualisasi dalam proses politik yang ada di Kota Lhokseumawe.

Masyarakat Tionghoa pada dasarnya memiliki tingkat kepekaan sosial yang tinggi di kota Lhokseumawe. Namun beda jika memperbincangkan politik karena hal tersebut merupakan persoalan sangat sensitif bagi masyarakat Tionghoa. dalam aspek politik praktis hal tersebut juga tidak terlepas dari peran serta masyarakat Tionghoa yang hanya sebatas partisipasi politik dalam pemilihan. Jika masuk ke ranah politik bagi kami masyarakat Tionghoa belum begitu berani untuk beraktualisasi hal ini adanya faktor tekanan di masa lalu yang mungkin tidak akan bisa dilupakan oleh sebagian masyarakat Tionghoa. Tentu saja persoalan ini memberikan sebuah tantangan sendiri bagi masyarakat Tionghoa yang ingin berpartisipasi aktif dalam proses politik tentu akan berimbas pada persoalan sosial dan dimensi lainnya. Hal ini yang merupakan sebuah persoalan yang harus dihadapi oleh etnis Tionghoa jika mau terlibat aktif dalam politik praktis.

Ada beberapa indikator yang menyebabkan pola perilaku Politik Masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe bisa berubah. Pertama, faktor isu politik yang memberikan sebuah gambaran dan pertimbangan

bagi masyarakat Tionghoa dalam menentukan sikap politik. Kedua, memberikan pemahaman tentang penting untuk masuk keranah politik praktis sehingga dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe. Ketiga pemulihan trauma politik masa lalu dalam meningkatkan kapasitas perilaku aktif dalam politik masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe. Keempat implementasi Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang penghapusan ras dan etnik harus dimaksimalkan di Kota Lhokseumawe. Kelima, masyarakat Kota Lhokseumawe harus memahami esensi dari keberagaman atau dimensi Multikultur yang ada. Keenam, semua elemen-elemen masyarakat yang ada di kota Lhokseumawe berhak untuk aktif dan terjun ke dalam dunia politik praktis.

Gambaran perilaku etnis Tionghoa sudah dapat dipahami bahwa keterlibatan dalam politik praktis tidak terlalu signifikan. Hal ini juga tidak terlepas dari *Pressure* dari kelompok-kelompok politik yang memerlukan dukungan penuh untuk menjadi pemimpin Kota Lhokseumawe pada pemilihan Walikota Lhokseumawe tahun 2017. partisipasi itu didasarkan pada keikutsertaan masyarakat Tionghoa dalam Proses politik namun tidak dalam politik praktis. Maka proses politik praktis masyarakat Tionghoa di Lhokseumawe sangat minim. Hal ini ditandai dengan hasil data yang di dapat sehingga memberikan sebuah

rumusan dalam pola perilaku politik Etnis Tionghoa di Kota Lhokseumawe.

Pola penguatan partisipasi yang hanya sebatas ikutserta dalam pemilihan memberikan sebuah gambaran partisipasi politik etnis Tionghoa di kota Lhokseumawe pasif sehingga tidak ada representasi politik dari masyarakat minoritas tersebut. Proses politik kota Lhokseumawe mestinya harus menjadi sebuah aktualisasi masyarakat Etnis Tionghoa untuk memajukan masyarakatnya dengan memilih seseorang dari masyarakat Tionghoa untuk menjadi wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe (DPRK). Namun hal tersebut tidak terjadi karena adanya *Pressure and Traumatic* pada masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe

2. Respon Masyarakat Tionghoa terhadap dinamika Politik yang berkembang di Kota Lhokseumawe

Penekanan bukan sebuah indikator yang paling signifikan maupun dengan aspek trauma masa lalu. Jika perilaku masyarakat etnis Tionghoa tadi memberikan sebuah gambaran perilaku politik yang pasif maka berbeda dengan respon etnis Tionghoa. Respon masyarakat Etnis Tionghoa terhadap dinamika politik yang berkembang di Kota Lhokseumawe sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan ketika warga etnis Tionghoa mencoba menemukan informasi tentang calon kepala daerah yang akan mereka pilih dan dapat berkomunikasi secara langsung. Namun yang paling penting masyarakat

Tionghoa hanya mendengarkan perkembangan politik dari calon pertahana. Hal ini biasa dan sering berlangsung pada saat pra pemilihan dan pada saat pemilihan berlangsung. Respon dinamika politik yang berkembang berkaitan dalam aspek perdagangan dan bisnis dan terkait dengan kebijakan pemerintahan kota Lhokseumawe dimasa depan. Hal ini penting bagi masyarakat Tionghoa yang ada di Lhokseumawe.

Penentuan jati diri dari masyarakat Tionghoa sampai saat ini belum begitu jelas karena orientasi pilihan dalam politik lebih kepada arah kebijakan walikota terpilih nantinya. Seperti sebuah peluang yang sangat strategis ketika mampu melakukan manajemen isu dengan baik. Sebenarnya keinginan sebagian masyarakat Tionghoa ingin memberikan sumbangsih bagi negara ini. Namun karena masih ada anggapan

bahwa sebagai masyarakat minoritas maka tidak dapat memberikan kontribusi secara politik. Tentu dinamika politik yang ada di Kota Lhokseumawe terus berubah seperti pemilihan walikota tahun 2006 dengan 2012 dan juga 2017 berbeda arah politiknya. Namun Masyarakat Tionghoa tetap konsisten hanya mendukung calon pertahana walaupun tidak memenangi kontestasi namun itu tidak menjadi persoalan sehingga partisipasi politik tetap dalam dimensi pemilihan.

Sikap politik dimunculkan oleh masyarakat Tionghoa setelah adanya informasi yang kongkrit mengenai isu-isu politik kekinian di Kota Lhokseumawe. Hal tersebut mampu mempengaruhi pola perilaku masyarakat Tionghoa dalam menentukan arah dan sikap politiknya seperti Tabel Berikut Ini:

Tabel 1
Dimensi perilaku politik parktis dengan Respon terhadap Fenomena politik

| | |
|--|--|
| Perilaku Politik Praktis | Respon terhadap proses Politik |
| Partisipasi Politik Aktif semi pasif | Aktif mengikuti silaturahmi politik |
| <i>Political Pressure</i> | Mendengarkan arah politik dari Paguyuban atau organisasi Tionghoa |
| <i>Traumatic Syndrome of politics Experience</i> | Lebih memberi dukungan kepada elite-elite politik berkuasa (Pertahana) |
| Permasalahan pada Personalisasi dalam politik | Personalisasi terhadap pemimpin non Tionghoa |

Gambaran tabel di atas jelas member gambaran bahwa kekuatan terbesar pada perilaku politik ada pada respon bukan perilaku politik praktis.

Maka secara rasional maka partisipasi yang dimunculkan dalam politik aktif semi pasif. Hal tersebut mendekati partisipasi rasional dalam pola perilaku

politik masyarakat Tionghoa secara umum. Memang partisipasi individu dalam merespon dinamika politik yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa sangat stabil hal ini yang dikatakan oleh informan berikut dalam respon politik masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe. Respon masyarakat Tionghoa dalam politik praktis hanya terbatas pada pemilihan dan pendekatan secara partisipasi rasional. Pada saat Pilkada banyak calon kandidat yang datang untuk meminta dukungan politik sebagai walikota periode selanjutnya pada masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe.

Masyarakat Tionghoa sudah mengambil sikap politik untuk tidak memilih selain calon pertahana. Masyarakat Tionghoa memandang bahwa pertahana bisa menjadi pemenang. Realita Pilkada pada tahun 2006 calon pertahana yang di dukung mengalami kekalahan hingga pada Pilkada 2012. Namun pada Pilkada 2017 yang lalu calon pertahana yang didukung oleh Masyarakat Tionghoa memenangkan kompetisi Pilkada di kota Lhokseumawe. Masyarakat Tionghoa juga mengikuti segala dinamika politik yang berkembang terkait dengan calon kandidat yang didukung. Perilaku masyarakat Tionghoa dalam merespon dinamika politik lebih kepada dukungan politik terhadap Calon kadidat pertahana. Masyarakat Tionghoa meyakini bahwa hasilnya akan memenangkan kandidat calon walikota yang mereka dukung akan menang pada Pilkada 2017.

Sikap politik Masyarakat Tionghoa merupakan hasil dari mengikuti perkembangan dinamika politik Kota Lhokseumawe yang dapat memenangkan kandidat walikota yang didukung penuh oleh masyarakat Tionghoa. Pilkada 2017 tidak hanya berdasarkan isu namun sudah adanya pemetaan kekuatan politik sehingga hal ini mempengaruhi proses politik dalam Pilkada itu sendiri. Maka partisipasi politik masyarakat Tionghoa menjadi sebuah spekulasi yang diperhitungkan oleh para politisi yang ada di Lhokseumawe. Komunitas masyarakat Tionghoa tidak sedikit dan tersebar di beberapa wilayah dalam kota Lhokseumawe. arah kerangka perilaku masyarakat Tionghoa berdasarkan pemetaan politik yang dibuat oleh paguyuban Tionghoa itu sendiri.

Sebenarnya sarana penyampaian informasi memberikan respon politik dari masyarakat Tionghoa di kota Lhokseumawe. Hal ini merupakan sebuah respon politik yang muncul dari masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe ketika Informasi yang di dapat sangat jelas dan kongkrit dari paguyuban masyarakat Tionghoa di Kota Lhokseumawe. perilaku Masyarakat Tionghoa menjadi sebuah kalkulasi politik yang harus diperhitungkan bagi setiap aktor politik di Kota Lhokseumawe yang ingin maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada. Perilaku politik etnis Tionghoa di Lhokseumawe dapat disebut Partisipasi rasional.

E. Kesimpulan

Proses politik di kota Lhokseumawe telah memberikan sebuah gambaran bahwa fenomena yang berkembang mampu mempengaruhi perilaku politik masyarakat Tionghoa. Perilaku etnis Tionghoa lebih kepada dukungan secara politik. Pemetaan kekuatan politik yang dilakukan masyarakat Tionghoa lebih melihat proses Politik yang berkembang di Kota Lhokseumawe. Jadi hal ini memberikan gambaran bagi masyarakat Tionghoa untuk menentukan sikap politik dalam memberi dukungan pada Pilkada 2017 yang lalu. tentunya ini adalah sebuah indikator tercapainya kesepakatan politik dan menginformasi kepada seluruh paguyuban Tionghoa yang ada di Lhokseumawe agar mendukung calon kandidat walikota yang telah disepakati bersama. Perilaku Politik masyarakat Tionghoa juga berdasarkan rasionalitas perkembangan politik dan adanya kesepakatan secara politik dengan kandidat walikota pertahana sehingga dapat dipastikan dukungan akan didapat oleh kandidat walikota yang sedang berkuasa memimpin Kota Lhokseumawe.

Respon masyarakat Tionghoa terhadap perkembangan politik didasarkan kepada proses perkembangan dinamika politik terkini dan lebih melihat peta kekuatan suatu kelompok dalam politik di kota Lhokseumawe. Hal ini merupakan sebuah inti dari respon politik masyarakat Tionghoa yang cenderung aktif hanya dalam kontestasi Pilkada di Kota Lhokseumawe. Proses tersebut

juga tidak membuat masyarakat etnis Tionghoa di Kota Lhokseumawe peduli terhadap aspek Pilkada saja namun tidak politik praktis secara Umum. Respon terhadap perkembangan politik sebagai kontrol terhadap isu-isu seputaran Pilkada saja oleh masyarakat Tionghoa Kota Lhokseumawe. Namun respon terhadap kebijakan tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat Tionghoa karena sangat kondusif dan stabil. Sehingga esensi partisipasi rasional didasarkan pada respon masyarakat Tionghoa yang aktif namun perilaku politik semi pasif di kota Lhokseumawe.

F. Daftar Pustaka

- Akbar, Idil. 2018. *Politik Etnis Tionghoa di Indonesia*. Yogyakarta: Suluh Media
- Fauls, Keith 2010, *Sosiologi Politik pengantar Kritis*. Bandung, Nusa Media
- Jurdi, Fatahullah. 2014. *Studi Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Moleong, Lexy J, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Nasiwan. 2010. *Teori-Teori Politik Indonesia*. Yogyakarta: UNY Press
- Notoatmodjo, S. 2007. *Pendidikan dan Perilaku kesehatan*. Cetakan 2 Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Rahman, H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

Teuku Muzaffarsyah dan Zulhilmi

Setiono, Benny. 2008. *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*. Jakarta: ELKASA

Jurnal, Laporan dan Artikel Ilmial

Eko Satriya Hermawan. 2013. *Menuju Pemilu Pertama: Perilaku Politik Etnis Tionghoa Di Surabaya 1950-an*. Tesis. Magister Sejarah Universitas Gadjah Mada

Juliasutik. September 2010. *Perilaku Elit Politik Etnis Tionghoa Pasca*

Reformasi. Jurnal *Humanity*, Volume 6, No.1.

Khadafi, 2011. *Kehidupan Masyarakat Tionghoa Kampung Gedong*. VOI News Letter III-Tahun 1, No.2.

Peraturan dan Regulasi

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2015 Tentang Pemilu.

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

*

BIODATA PENULIS



M. Akmal, S.Sos., MA., lahir pada tanggal 9 Oktober 1964. Ia sekarang adalah Dekan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh untuk periode 2016 hingga 2020.



Bobby Rahman, S.Sos., M.Si., lahir pada tanggal 03 September 1984 di Lhokseumawe. Ia sekarang adalah Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sejak tahun 2008 hingga sekarang.



Teuku Muzaffarsyah, S.IP., M.A.P. lahir pada tanggal 09 Januari 1979 di Langsa. Ia sekarang adalah Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh dan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sejak 2008 hingga sekarang.



Mulyadi, S.Ag., MA. lahir pada tanggal 10 Agustus 1974 Ia sekarang adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sejak tahun 2006 hingga sekarang.



Zulhildi, S.IP., M.H.I., lahir pada tanggal 27 Agustus 1984 di Peudawa Rayeuk. Ia sekarang adalah dosen BOPTN pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh sejak tahun 2016.



Taufik Abdullah, S.Ag., MA., lahir pada tanggal 21 Januari 1974 di Gampong Lada. Ia sekarang adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh.